



Oleh: H. Suarmadjat, ST

Oh, Kota Layak Anak?



MERAIH penghargaan atau predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada akhirnya kini, makin memiriskan dengan kenyataan atau realitas dihadapkan di atas kertas. Contohnya, WTP Kota Layak Anak bagi Kota Pontianak. Benarkah penilaian untuk ibu-kota provinsi yang jadi barometer 13 kota/kabupaten di Kalbar ini sudah jujur?

Seharusnya dengan mendapat WTP itu kinerja semakin ditingkatkan, hasilnya pun berkualitas.

■ Halaman 7

Oh, Kota Layak Anak?

Jangan bangga dan larut dengan penghargaan. Lihatlah, masih ada anak-anak bawah umur jualan koran di Kota Pontianak, masih banyak anak-anak yang terlantar sekolahnya dan bekerja membantu orangtua.

Coba lihat kafe-kafe, warung kopi dan tempat lainnya yang masih banyak anak-anak bekerja seperti orang dewasa. Apakah ini sekadar klaim pemerintah anak diperbolehkan bekerja hanya tiga jam saja? Lalu di mana pengawasan dengan kenyataan di lapangan?

Inilah kenyataan WTP yang menunjukkan kinerja pimpinan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih ada yang bekerja di belakang meja. Menerima laporan asal bapak/ibu senang (ABS). Tentu tak semuanya, tidak untuk di-

generalisir. Tapi, laporan kasus pencabulan murid SDN di Pontianak Utara berusia 10 tahun nyaris mengendap kasusnya, sangat memiriskan. Lebih parah lagi dari anak yang bekerja.

Sejauh ini pemerintah seakan tutup mata alias tak ambil pusing dengan perilaku anak di luar rumah dan di luar sekolah. Dengan dalih membantu ekonomi keluarga, mereka rela bekerja paroh waktu untuk mendapatkan upah layaknya orang dewasa. Rasanya pimpinan SKPD harus mulai dari nol lagi melakukan pendataan di lapangan. Lantaran kondisinya saat ini masih banyak anak-anak yang masih mengerjakan pekerjaan orang dewasa.

Kasihannya mereka dan banyak anak yang kerjanya memprihatinkan seperti menjadi tukang

semir sepatu, gepeng dan sebagainya. Di mana perannya pemerintah yang mendapatkan WTP itu?

Paling menyedihkan bila anak-anak terlibat dan tersangkut dalam pelanggaran hukum baik pelaku apalagi sebagai korban kejahatan. Itu tadi anak SD dicabuli wali kelasnya. Masalah seperti ini jangan dipandang sepele, apalagi kalau sampai ada niatan mau dipetieskan. Pengawasan harus lebih ketat jangan sekadar ingin mendapatkan WTP tanpa perlindungan dan memberikan hak anak secara layak.

***Anggota DPRD Kota Pontianak, dituturkan kembali oleh Gusnadi-RK**